

RINGKASAN

**ALBIE BACHRIM
200510345**

**Efektivitas Majelis Pengawas Daerah
Notaris Dalam Pengawasan Jabatan
Notaris Berdasarkan Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris (Penelitian Di Kota Lhokseumawe)
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr.
Elidar Sari, S.H., M.H)**

Implementasi pengaturan dan pengawasan terhadap jabatan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian hukum di bidang perdata, sehingga perlu dilakukan pengawasan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPND) merupakan lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap notaris di tingkat daerah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas MPND dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di Kota Lhokseumawe

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara terhadap anggota MPND, notaris aktif, serta pihak-pihak terkait, dan dilengkapi dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan temuan berdasarkan kerangka hukum dan teori pengawasan administrasi.

Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahwasanya MPND menjalankan fungsi pengawasan melalui tiga peran utama, yaitu fungsi pembinaan, fungsi pemeriksaan, serta fungsi klarifikasi. Efektivitas pelaksanaan tugas MPND terlihat dari upaya sistematis dalam melakukan pembinaan, penanganan laporan, dan pemeriksaan terhadap akta sebagai objek yuridis, bukan personalisasi terhadap notaris. Majelis pengawas notaris telah berupaya memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap kinerja notaris, serta mendorong kepatuhan terhadap kode etik jabatan notaris.

Disarankan Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas pengawasan jabatan notaris dan memastikan bahwa struktur kelembagaan MPND di daerah memiliki kewenangan dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara independent. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan jabatan oleh notaris sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial.

Kata Kunci: Notaris, Pengawasan, Majelis Pengawas Daerah, Efektivitas, Jabatan Notaris, Lhokseumawe

SUMMARY

**ALBIE BACHRIM :
200510345**

***Effectiveness Of The Regional Notary
Supervisory Council In Supervising Notary
Offices Based On Law Number 30 Of 2004
Concerning Notary Offices (Research In
Lhokseumawe City)
(Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum dan Dr.
Elidar Sari, S.H., M.H)***

Implementation of Regulation and Supervision of Notary Positions as Public Officials Authorized to Draft Authentic Deeds. Based on Article 15 of Law No. 2 of 2014, which amends Law No. 30 of 2004 on the Notary Position, notaries play a vital role in ensuring legal certainty in civil matters. Therefore, supervision is necessary to prevent the abuse of authority. The Regional Supervisory Council of Notaries (MPND) is an institution established to carry out the supervisory function of notaries at the regional level. The aim of this study is to assess the effectiveness of MPND in supervising notaries in the city of Lhokseumawe.

This research utilizes an empirical juridical method. Data is collected through field studies, including interviews with MPND members, active notaries, and other relevant parties, and is complemented by a literature review of applicable regulations and relevant legal literature. Data analysis is conducted qualitatively by interpreting the findings based on the legal framework and administrative supervision theory.

The study results show that, in accordance with Article 67 of Law No. 2 of 2014, which amends Law No. 30 of 2004 on the Notary Position, the MPND performs its supervisory function through three primary roles: the function of guidance, the function of examination, and the function of clarification. The effectiveness of MPND's duties is reflected in its systematic efforts to provide guidance, handle reports, and examine deeds as legal objects, rather than personalizing the actions of notaries. The Notary Supervisory Council has made efforts to strengthen its supervisory role by conducting periodic assessments of notary performance and promoting adherence to the notary code of ethics.

It is recommended that the Regional Supervisory Council of Notaries increase the intensity and quality of supervision over the implementation of notarial duties. The government should also periodically evaluate the effectiveness of notary position supervision and ensure that the institutional structure of MPND at the regional level has the appropriate authority and capacity to perform its duties independently. Public participation in reporting alleged violations or abuse of office by notaries is essential as a form of social control.

Keywords: Notary, Supervision, Regional Supervisory Council, Effectiveness, Legal Profession, Lhokseumawe